

4 April 05

1801/24-11-05



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 490 /MENKES/SK/ IV /2005
TENTANG
IJIN PBBBF PT. TATARASA PRIMATAMA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. Tatarasa Primatama No. 0301/X/TP/2004 tanggal 14 Desember 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta tanggal 23 Desember 2004;
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 162/1.7778 tanggal 11 Januari 2005.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. TATARASA PRIMATAMA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada **PT. TATARASA PRIMATAMA**, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.998.077.0-035.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alamat Kantor, Laboratorium dan Gudang Utama terletak di Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T2/23 Puri Kembangan Jakarta Barat,
2. Gudang tambahan tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jl. Pulobuaran Raya / VC Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur.
3. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kedua : Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 4 April 2005



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.